



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 400.13.46.1/13/DP3AP2KB/ 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB), KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN/IMP (PPKBD DAN SUB PPKBD), PENGUATAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB), AKSEPTOR KB LESTARI , RUMAH DATA KEPENDUDUKAN (RDK) DAN VIDEO EDUKASI OLEH PKB TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemberian Apresiasi dan salah satu bentuk pembinaan untuk mengoptimalkan capaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting perlu dilaksanakan Lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Akseptor KB Lestari, Rumah Data Kependudukan (RDK), dan Video Edukasi oleh PKB ;
 - b. bahwa berdasarkan Panduan Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik Tahun 2025 dan Panduan Penguatan dan Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas 2025
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tentang Penetapan Pemenang Lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Kader Institusi Masyarakat Pedesaan/IMP (PPKBD dan Sub PPKBD), Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Akseptor KB Lestari, Rumah Data Kependudukan (RDK), dan Video Edukasi oleh PKB Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

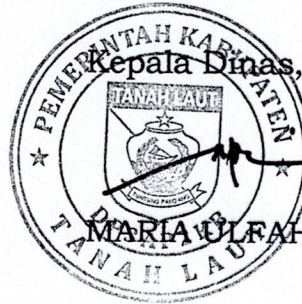
Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tentang Penetapan Pemenang Lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Kader Institusi Masyarakat Pedesaan/IMP (PPKBD dan Sub PPKBD), Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Akseptor KB Lestari, Rumah Data Kependudukan (RDK), dan Video Edukasi oleh PKB Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama Pemenang Lomba sebagaimana DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA : Juara Terbaik I dari Pemenang Lomba sebagaimana DIKTUM KESATU berhak untuk diikuti dalam Lomba yang sama ke Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan dan Tingkat Nasional jika terpilih Juara Terbaik I Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut:
- a. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Sumber

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025; dan
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Sumber Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Maret 2025



MARIA ULFAH, S.Psi, M.M

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DP3AP2KB
 NOMOR : 400.13.46.1/13/ DP3AP2KB/2025
 TANGGAL : 27 Maret 2025

NAMA-NAMA PEMENANG LOMBA PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB), KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN/IMP (PPKBD DAN SUB PPKBD), PENGUATAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB), AKSEPTOR KB LESTARI , RUMAH DATA KEPENDUDUKAN (RDK) DAN VIDEO EDUKASI OLEH PKB TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KATEGORI LOMBA	PERINGKAT	NAMA PEMENANG	DESA/KECAMATAN
1	2	3	4	5
1.	Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)	Juara I	Sofa Roliadini, SKM	Kurau
		Juara II	Annisa Maresti Yanda , SE, M.Si	Takisung
		Juara III	Rini Mariati, SE	Bumi Makmur
2.	Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	Juara I	Ramdiah	Pagatan Besar / Takisung
		Juara II	Sujiah	Batu Tungku / Panyipatan
		Juara III	Salmiah	Tebing Siring / Bajuin
3.	Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	Juara I	Kampung KB Janar Kuning	Kunyit / Bajuin
		Juara II	Kampung KB Langgeng Kencana	Bumi Jaya / Pelaihari
		Juara III	Kampung KB Alur	Alur / Jorong
4.	Akseptor KB Lestari	Juara I	Siti Aminah dan Hendra Setiawan	Tirtajaya / Bajuin
		Juara II	Kuswanti dan Puryanto	Bumi Jaya / Pelaihari
		Juara III	Sutini dan Darimin	Sabuhur / Jorong

5.	Rumah Data Kependudukan (RDK)	Juara I	RDK Janar Kuning	Kunyt / Bajuin
		Juara II	RDK Langgeng Kencana	Bumi Jaya / Pelaihari
		Juara III	RDK Kuringkit	Kuringkit / Panyipatan
6.	Lomba Video Edukasi	Juara I	Balai KB Bati Bati	Bati Bati
		Juara II	Balai KB Bajuin	Bajuin
		Juara III	Balai KB Panyipatan	Panyipatan



KEPALA DINAS,

MARIA ULFAH, S.Psi, M.M